



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2023**

**LARANTUKA
2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur patut kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas tuntunan, bimbingan dan perlindunganNya jualah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah maka Inspektorat Kabupaten Flores Timur telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2023.

Penyusunan LKIP InspektoratDaerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan sebagai bahan informasi pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah selama tahun 2023. Dalam LKIP ini tidak hanya membandingkan antara target dengan realisasi pada tahun yang bersangkutan tetapi juga membandingkan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kami mengharapkan masukan dan kritikan yang positif dan konstruktif demi penyempurnaan LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 ini.

Semoga Laporan ini bermanfaat bagi Jajaran Inspektorat Daerah dan semua pihak serta sebagai tolak ukur pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah secara lebih optimal dalam pelayanan dan sebagai saran evaluasi yang konstruktif bagi seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur menuju peningkatan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Larantuka, 20 Januari 2024

Inspektorat Daerah

Kabupaten Flores Timur, *b*



Antonius Lehi Raya, S.Sos., M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19651023 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur .	1
1.2.1 Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah	1
1.2.2 Sumber Daya Manusia ²	
1.2.3 Struktur Organisasi	3
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
1.4 Aspek Strategis Inspektorat Daerah.....	7
1.5 Dasar Hukum.....	9
1.6 Sistematika Penyajian	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 Rencana Strategis.....	11
2.2 Tujuan Strategis	11
2.3 Sasaran Strategis	11
2.4 Program dan KegiatanPerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.....	12
2.5 Indikator Kinerja Utama	14
2.6 Perjanjian Kinerja 2023	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	19
3.2 REALISASIANGGARAN	38
3.2.1 Belanja Program/Kegiatan	38
BAB IV PENUTUP	41
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1	Klasifikasi Menurut Jenjang Kepangkatan/Golongan Ruang Tahun 2023	2
1.2	Klasifikasi menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023.....	3
1.3	Jabatan Struktural Tahun 2023	5
1.4	Jabatan Fungsional Tahun 2023	5
2.1	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur	15
2.2	Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023	17
2.3	Program Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 ..	18
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	21
3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	23
3.3	Pemeriksaan Kerugian Negara/ Daerah Wajib Setor Temuan APIP-APEP Bernilai Uang sampai dengan Tahun 2023	23
3.4	Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	24
3.5	Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	26
3.6	Target dan Realisasi Kinerja Reviu Laporan Kinerja	27
3.7	Target dan Realisasi Kinerja Reviu Laporan Keuangan.....	28
3.8	Target dan Realisasi Kinerja Pengawasan Desa	28
3.9	Target dan Realisasi Kinerja Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	30
3.10	Target dan Realisasi Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	31
3.11	Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.....	32
3.12	Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	33
3.13	Target dan Realisasi Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.....	34
3.14	Target dan Realisasi Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.....	35
3.15	Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	36
3.16	Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	37

3.17	Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Kelompok Belanja	38
3.18	Realisasi Belanja Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023	39

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 ini adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur terhadap capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun berjalan.

LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 ini disusun dengan membandingkan antara target kinerja yang direncanakan dengan hasil kinerja yang telah dicapai.

LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 memiliki 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 berada pada kategori **“Rendah”** atau 55,68% dari target sasaran strategis sebesar 40,82%.

Selama tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) Kegiatan. Adapun rincian hasil pencapaian kinerja program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kota : **86,75%**
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 93,75%
 - b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah : 100%
 - c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah : 100%
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah : 100%
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah : 100%
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah : 100%
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah : 100%
 - h. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah : 0,00%
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan : **83,33%**
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal : 83,67%
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu : 81,82%

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi :
115,15%
- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan: 150,00%
 - b. Pendampingan dan Asistensi : 112,90%

Sesuai data capaian masing –masing program di atas maka kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 adalah sebesar 94,62%. Capaian kinerja ini masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Pagu Anggaran yang disediakan sebesar Rp5.484.332.897,00 (*lima milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh*) Penyerapan anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2023 sebesar Rp5.214.063.721,00 (*lima milyar dua ratus empat belas juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu*) atau 95.07%.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah sebagai wujud dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah selama tahun 2023. Penyusunan LKIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam hal mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku pimpinan tertinggi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dituntut dapat membantu meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur

1.2.1 Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, disebutkan bahwa Inspektorat Daerah

Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Flores Timur melalui Sekretaris Daerah

1.2.2 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 58 orang yakni 43 orang PNSD dan Honorer Daerah sebanyak 15 orang yang terdiri dari 40 laki-laki dan 18 orang perempuan, yang diklasifikasi seperti pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Klasifikasi Menurut Jenjang Kepangkatan/Golongan Ruang
Tahun 2023

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	1	0
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	5	4	1
3	Pembina (IV/a)	8	7	1
4	Penata Tingkat I (III/d)	5	2	3
5	Penata (III/c)	2	1	1
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	7	3	4
7	Penata Muda (III/a)	11	7	4
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	1	1	0
9	Pengatur (II/c)	1	1	0
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	0	0	0
11	IX	2	1	1
12	Tenaga Honorer Daerah	4	4	0
Jumlah		47	32	15

Tabel 1.2
Klasifikasi menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	3	2	1
2	Sarjana (S1)	27	20	7
3	Sarjana Muda/Diploma (D III)	4	2	2
4	SLTA	9	6	3
5	SLTP	0	0	0
6	Tenaga Honorer S1	1	1	0
7	Tenaga honorer D3	0	0	0
8	Tenaga Honorer SLTA	3	3	0
Jumlah		47	34	13

1.2.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. Dibidang kesekretariatan, Inspektur dibantu oleh seorang Sekretaris dan 1 (satu) kepala Sub Bagian dan jajaran staf/pelaksana. Dibidang pengawasan dibantu oleh 5 (lima) Inspektur Pembantu, yang melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan wilayah yang dijelaskan sbb:

- a. Inspektur Pembantu I, dengan wilayah Binaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Kecamatan Wulanggitang, Ile Bura, Titehena dan Demon Pagong.
- b. Inspektur Pembantu II, dengan wilayah Binaan pada Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,

Inspektorat, dan Kecamatan Lewolema, Larantuka, Ile Mandiri dan Tanjung Bunga.

- c. Inspektur Pembantu III, dengan wilayah Binaan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Kecamatan Solor Barat, Solor Timur, Solor Selatan, Wotan Ulumado, Adonara Barat dan Adonara Tengah.
- d. Inspektur Pembantu IV, dengan wilayah Binaan pada Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Badan Penanggulangan Bencana Daerah, UPTD RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Kecamatan Adonara Timur, Ile Boleng, Witihama, Kelubagolit dan Adonara.
- e. Inspektur Pembantu V, Inspektur pembantu wilayah dibantu oleh para Pejabat Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Auditor

secara fungsional bertanggungjawab langsung kepada Inspektur yang diklasifikasikan seperti tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Jabatan Struktural Tahun 2023

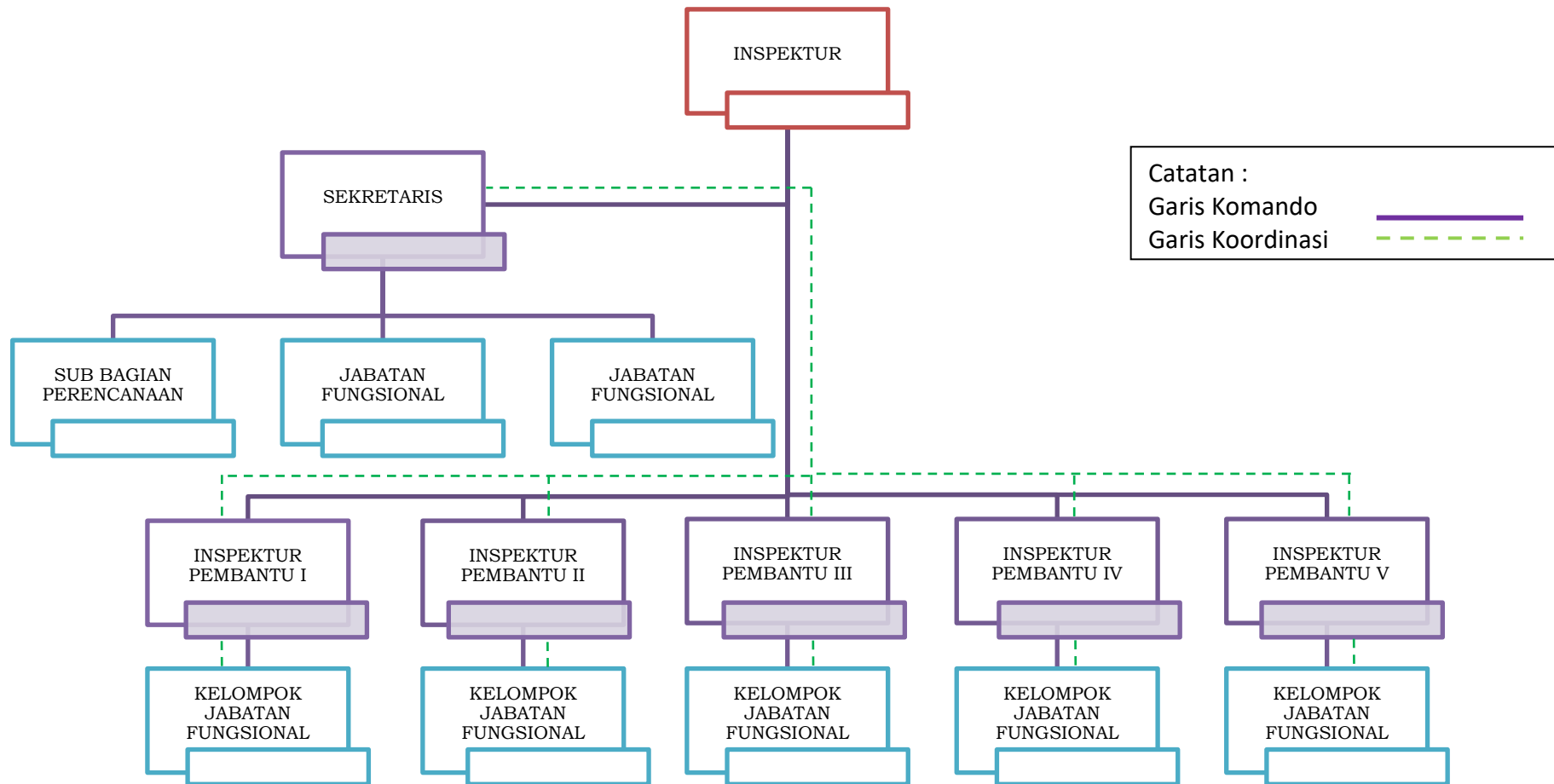
No.	Jabatan Struktural (eselon)	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah	Ket.
1	II.b	1	0	1	
2	III.a	5	1	6	
3	IV.a	1	0	1	
Jumlah		7	1	8	

Tabel 1.4
Jabatan Fungsional Tahun 2023

No.	Jabatan Fungsional	Laki-laki (orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)	Ket.
I	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)				
1	Pengawas Pemerintahan Madya	4	1	5	
2	Pengawas Pemerintahan Muda	1	1	2	
3	Pengawas Pemerintahan Pertama	2	0	2	
Jumlah I		7	2	9	
II	Auditor				
1	Auditor Madya	3	0	3	
2	Auditor Muda	2	2	4	
3	Auditor Pertama	2	0	2	
4	Auditor Penyelia	0	0	0	
5	Auditor Pelaksana Lanjutan	1	1	2	
6	Auditor Trampil	1	0	1	
Jumlah II		9	3	12	
III	Analisis				
1	Analisis Kepegawaian	1	0	1	
Jumlah III		1	0	1	
Total I – III		17	5	22	

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI



1	Inspektur	Eselon IIb	Antonius Lebi Raya,S.Sos.M.Ap
2	Sekretaris	Eselon IIIa	Fransiskus Xaverius Resiona, S.Sos
	Sub. Bagian Perencanaan	Eselon IVa	Simon Senari Beda,SST .
	Pranata Humas		-
3	Inspektur Pembantu I	Eselon IIIa	Laurensius S. Fernandez Aikoli, SP
4	Inspektur Pembantu II	Eselon IIIa	Apollonaris Bala Agan, S.Pi.
5	Inspektur Pembantu III	Eselon IIIa	Kornelia Serang Koten, S.Sos
6	Inspektur Pembantu IV	Eselon IIIa	Suhaemi, SE
7	Inspektur Pembantu V	Eselon IIIa	Romualdus Lesu Wungubelen, SH., M.Si
8	Kelompok Jabatan Fungsional		

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas **membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.**

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Bidang Pengawasn;
2. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengawasan;
3. Pelaksanaan Adminstrasi Inspektorat;
4. Pembinaan, Pengorganisasian dan Pengendalian Urusan Pengawasan;
5. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pengawasan; dan
6. Pelaksanaan Fungsi Lainnya yang diberikan oleh Atasan Terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

1.4 Aspek Strategis Inspektorat Daerah

Sebagai lembaga pengawas intern pemerintah, Inspektorat Daerah harus mampu melaksanakan pengawasan intern secara efektif atas sejumlah program/kegiatan prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur dan sepenuhnya mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan program/kegiatan dapat mencapai tujuannya secara

efisien dan efektif, melaporkan keuangan secara handal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal memiliki peran sebagai katalisator dan dinamisator dalam menyukseskan pembangunan daerah. Kontribusi Inspektorat tersebut dimaksudkan untuk mendukung pemerintah daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*).

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat dan peran baru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan juga Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, peran Inspektorat semakin ditingkatkan, yang semula sebagai *watchdog* bergeser perannya menjadi *quality assurance* dan *consulting*. Hal ini berarti, pengawasan yang dilakukan Inspektorat harus mampu memberikan nilai tambah (*value*) bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan pada akhirnya kepada masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi yakni menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, diperlukan peran APIP yang efektif, yaitu dalam wujud:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*assurance activities*);
2. memberikan peringatan dini (*early warning system*) dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*anti corruption activities*);
3. memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

1.5 Dasar Hukum

Penyusunan LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur mengacu kepada:

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2005 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur

1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang gambaran umum organisasi, kedudukan, tupoksi dan aspek – aspek strategis organisasi, dasar hukumserta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan mengenai rencana strategis, penetapan kinerja dan rencana anggaran. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil disertai dengan analisis efisiensi dan efektifitas.

Bab IV Penutup

Menjelaskan tentang kesimpulan yang menyeluruh dari isi LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dan merekomendasikan hal – hal yang dipandang perlu untuk perencanaan, kebijakan dan penyelenggaraan di masa yang akan datang guna peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu – isu strategis. Dalam RENSTRA disusun visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tahun pertama Rencana Strategis periode 2023 -2026. Adapun sasaran strategis adalah **Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan** dengan Indikator **Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti**.

2.2 Tujuan Strategis

Rumusan tujuan Inspektorat Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong terwujudnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
- b. Menjadikan Aparat pengawas Intern pemerintah yang dapat berperan sebagai *counsuliting partner*, *quality assurance*, *problem solver*, dan *early warning system*.
- c. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan kekuatan profesi pengawasan yang akuntabel.

2.3 Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Adapun sasaran strategis adalah

Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan dengan Indikator
Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti

2.4 Program dan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai penjabaran dari tujuan strategis adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
 - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan Pengolahan administrasi Kepegawaian
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- h. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Perlengkapan Gedung Kantor
 - Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
 - Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
 - Sub Kegiatan Pengawasan Desa
 - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan
 - Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 - 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
 - Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

2.5 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia maka diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penanggungjawab	Sumber Data	Definisi Operasional Formula/Rumus Perhitungan
1	2	3	4	5	6
1	Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti	Inspektorat Daerah	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan : - BPK - BPKP - Inspektorat Provinsi NTT - Inspektorat Daerah Kab. Flores Timur	1. Penyimpangan pengelolaan keuangan : pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Rekomendasi : - Saran/perbaikan atas temuan pengawasan - Perintah pengembalian Kerugian Keuangan Negara/Daerah $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Total Rekomendasi}} \times 100\%$

2.6 Perjanjian Kinerja 2023

Perencanaan kinerja merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen yang baik. Rencana kinerja akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengecek apakah organisasi telah melaksanakan delegasi wewenang yang diamanahkan.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan dan penetapan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Berikut adalah Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 :

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Tersedia	14 Dokumen/ Laporan	14 Dokumen/ Laporan
2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44 Orang/ Bulan	44 Orang/ Bulan
			12 Dokumen	12 Dokumen
3	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang OPD	3 Laporan	3 Laporan
4	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian	Persentase Terpenuhinya Unsur Kapabilitas APIP	2 Dokumen	2 Dokumen
				4 Orang
5	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang, Dokumen dan Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang disediakan	7 Paket	9 Paket
			42 Laporan / Dokumen	42 Laporan / Dokumen
6	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Yang Disediakan	3 Unit	2 Unit
7	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35 Laporan	36 Laporan
8	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	26 Unit	26 Unit
9	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	54 Laporan/ Dokumen	54 Laporan/ Dokumen
10	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	9 Laporan	11 Laporan
11	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi
12	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah Yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	2 Kegiatan	8 Kegiatan
			23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah

Untuk mencapai Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui 3 (tiga) Program yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2023

No	Uraian Program	Jumlah Anggaran	
		Sebelum Revisi	Setelah Revisi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 4.466.045.151,00	Rp 4.488.695.167,00
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 455.470.980,00	Rp 727.891.130,00
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 94.766.350,00	Rp 267.746.600,00
J U M L A H		Rp 5.016.282.481,00	Rp 5.484.332.897,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan Pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggung jawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintah di lingkungan Pemerintahan Daerah, diharapkan dapat menjadi lembaga yang strategis dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam rangka mewujudkan eksistensi lembaga pengawasan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur telah melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada sesuai dengan sasaran organisasi sehingga memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk Membandingkan keberhasilan nyata pelaksanaan kegiatan dengan tingkat hasil yang diharapkan, pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran, yakni dengan cara memanfaatkan data kinerja yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan laporan kegiatan lainnya.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja program/kegiatan antara lain:

- a. Indikator kinerja masukan (*input*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan.
- b. Indikator kinerja keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik fisik maupun non fisik
- c. Indikator kinerja hasil (*outcome*) merupakan indikator kinerja yang menunjukkan berfungsinya keluaran (*output*).

Untuk mengukur kinerja sasaran, pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

*) Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pada tahun 2023 dalam Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur terdapat 3 (tiga) program , 12 (dua belas) kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun per Program sebagai berikut :

No.	Program	Pagu	Realisasi	Persentase (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.488.695.167,00	Rp4.276.474.771,00	95,27%
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp727.891.130,00	Rp681.082.950,00	93,57%
3	Program Perumusan Kebijakan dan Asistensi	Rp267.746.600,00	Rp256.506.000,00	95,80%
TOTAL		Rp5.484.332.897,00	Rp5.214.063.721,00	95,07%

Alokasi anggaran belanja langsung atau belanja program prioritas (program 2 dan program 3) untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur yaitu sebesar Rp995.637.730,00 (*sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh*) dengan realisasi sebesar Rp937.588.950 (*sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh*) atau sebesar 94,17%.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penanggungjawab	Sumber Data	Definisi Operasional Formula/Rumus Perhitungan
1	2	3	4	5	6
1	Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti	Inspektorat Daerah	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan : - BPK - BPKP - Inspektorat Provinsi NTT - Inspektorat Daerah Kab. Flores Timur	1. Penyimpangan pengelolaan keuangan : pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Rekomendasi : - Saran/perbaikan atas temuan pengawasan - Perintah pengembalian Kerugian Keuangan Negara/Daerah $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Total Rekomendasi}} \times 100\%$

Pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
1.	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti	40,82%	55,68%	136,40%

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana pada table tersebut di atas diperoleh dari penyelesaian tindak lanjut atas rekeomendasi hasil pemeriksaan oleh BPK dan BPKP (APEP) serta Inspektorat Provinsi NTT dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur (APIP).

Rincian Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pemeriksaan Kerugian Negara/ Daerah Wajib Setor
Temuan APIP-APEP Bernilai Uang sampai dengan Tahun 2023

No	APIP-APEP	Temuan / Rekomendasi		Tindak Lanjut		Sisa Tindak Lanjut		Persentasi	
		Rekom	Nilai	Rekom	Nilai	Rekom	Nilai	Rekom	Nilai
1	BPK	105	34.920.611.031,47	38	25.693.953.780,42	67	10.226.657.251,05	36,19%	73,58%
2	BPKP	102	910.898.124,71	40	338.540.143,99	62	563.357.980,72	39,22%	37,17%
3	ITPROV	197	870.423.424,63	145	616.308.064,46	52	254.115.370,17	73,60%	70,81%
4	ITDA	553	15.026.848.471,69	149	2.154.064.079,75	404	12.872.784.391,94	26,94%	14,33%
TOTAL		957	51.728.781.052,50	372	28.802.866.068,62	585	23.916.914.993,88	38,87%	55,68%

Data pada tabel tersebut menunjukkan realisasi rekomendasi temuan APIP dan APEP bernilai uang sampai dengan Desember Tahun 2023. Sebagaimana terlihat pada tabel tersebut bahwa selama tahun 2023 telah dilaksanakan tindak lanjut sebanyak 372 rekomendasi dari total jumlah sebanyak 957 rekomendasi sehingga pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah pada Tahun 2023 adalah sebesar 55,68% dari target sebesar 40,82%. Dengan demikian persentasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebesar **136,40%**.

Pada tahun 2023 BPK melakukan pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022. Jumlah rekomendasi nilai kerugian Negara/daerah sebagaimana pada tabel berikut :

No	APIP-APEP	Temuan/ Rekomendasi		Tindak Lanjut		Sisa Tindak Lanjut		Persentasi	
		Rek.	Nilai	Rek.	Nilai	Rek.	Nilai	Rek.	Nilai
1	BPK	30	1.856.111.553,01	11	130.050.739,94	19	1.726.060.813,07	36,67%	7,01%
	TOTAL	30	1.856.111.553,01	11	130.050.739,94	19	1.726.060.813,07	36,67%	7,01%

Berdasarkan realisasi dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diuraikan pencapaian sasaran kinerja kegiatan tahun 2023 sebagai berikut:

A. Program Penyelenggaraan Pengawasan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sasaran : Terlaksanananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

Pencapaian kinerja sasaran kegiatan ini dilakukan melalui beberapa sub kegiatan dengan target dan realisasi sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

No.	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	11 Laporan	7 Laporan	63,63%

Realisasi pencapaian kinerja output pada sub kegiatan ini adalah 7 laporan atau (63,63%) dari target 11 laporan.

Rincian capaian output kinerja pada sub kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Reviu Bumdes Bersama sebanyak 2 kali :
Output/kinerja : *Tidak ada LHR* (tidak dilaksanakan karena anggaran yang tersedia tidak cukup).

- 2) Reviu Dana BOS dilaksanakan sebanyak 2 kali :
 - Reviu Dana Bos Tahun 2022 :
Output/kinerja : LHR Dana BOS Tahun 2022
 - Reviu Dana Bos Tahun 2023 :
Output/kinerja : LHR Dana BOS Tahun 2023
- 3) Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2024 yang meliputi :
 - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024:
Output/kinerja : LHR atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.
 - Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 :
Output/kinerja : *Tidak ada LHR*
 - Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024:
Output/kinerja : *Tidak ada LHR*
 - Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024:
Output/kinerja : *Tidak ada LHR*
- 4) Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perubahan Tahun 2023 yang meliputi :
 - Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 :
Output/kinerja : LHR Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.
 - Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 :
Output/kinerja : LHR Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2023.
 - Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun 2023 :
Output/kinerja : LHR RKPA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2023.
 - Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 :
Output/kinerja : LHR Rancangan Kebijakan Umum Perubahaan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2023.

b. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 3.5
Target dan Realiasi Kinerja Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan
Pemerintah Daerah

No	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	8 Laporan	8 Laporan	100%

Realisasi pencapaian kinerja output pada sub kegiatan ini adalah 8 laporan atau (100%) dari target 8 laporan. Rincian capaian kinerja output pada sub kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Reviu DAK meliputi :
 - Reviu atas laporan realisasi Penyerapan DAK dan Capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik Tahap III Tahun 2022 untuk Pencairan Tahap I TA. 2023.
Output/kinerja : LHR atas Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi Sub bidang Sanitasi TA. 2022
 - Reviu Dokumen Kontrak DAK Non Fisik TA. 2023 :
Output/kinerja : LHR Dokumen DAK Non Fisik Bidang Kesehatan.
 - Reviu Penyerapan Capaian (Output) dan Penyerapan DAK Tahap I sebagai Syarat Salur Tahap II TA. 2023 :
Output/kinerja : LHR atas Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum Sub bidang Air Minum TA. 2023
 - Reviu Penyerapan Capaian (Output) dan Penyerapan DAK Tahap II sebagai Syarat Sebelum Pencairan Tahap III TA. 2023 :
Output/kinerja : LHR atas Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum Sub bidang Air Minum TA. 2023
- 2) Audit Kinerja pada OPD
Output/Kinerja : LHA Kinerja atas Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022
- 3) Audit Reguler OPD
Output/Kinerja: LHA Reguler pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur

- 4) Reviu DAU Spesifik meliputi :
 - Reviu DAU Spesifik Grant
Output/Kinerja : LHR DAU Spesifik Grant
 - Reviu DAU Spesifik
Output/Kinerja : LHR DAU Spesifik TA. 2023

c. Reviu Laporan Kinerja

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Kinerja Reviu Laporan Kinerja

No	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan	5 Laporan	83,33%

Realisasi pencapaian kinerja output pada sub kegiatan ini adalah 5 laporan atau (83,33%) dari target 6 laporan.

Rincian capaian kinerja output pada sub kegiatan ini sebagai berikut :

Reviu laporan kinerja meliputi :

- 1) Evaluasi SAKIP :
Output/Kinerja : LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2023
- 2) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Flores Timur
Output/Kinerja : LHR atas Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TA. 2022 Kabupaten Flores Timur
- 3) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Flores Timur:
Output/Kinerja : LHR Rancangan LPPD Kabupaten Flores Timur TA. 2022
- 4) Reviu Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU) :
Output/Kinerja : LHR atas Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan LHR atas Rancangan Standar Biaya dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Flores Timur TA. 2024
- 5) Reviu Tata Kelola Perizinan :
Output/Kinerja : *Tidak ada LHR* (reviu tidak dilaksanakan)
- 6) Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN):
Output/Kinerja : LHR atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Flores Timur

d. **Reviu Laporan Keuangan**

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Kinerja Reviu Laporan Keuangan

No	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Laporan Hasil Hasil Reviu Laporan Keuangan	6 Laporan	5 Laporan	83,33%

Realisasi pencapaian kinerja output pada sub kegiatan ini adalah 5 laporan atau (83,33%) dari target 6 laporan. Rincian capaian kinerja output pada sub kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 4 kali (Triwulan I – IV) :
Output/Kinerja : LHR Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang Jasa (PAPBJ) Triwulan I, II, III dan IV Kabupaten Flores Timur TA.
- 2) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD):
Output/Kinerja : LHR atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2022 Kabupaten Flores Timur
- 3) Reviu Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur :
Output/Kinerja : *Tidak ada LHR* (Reviu tidak dilaksanakan).

e. **Pengawasan Desa**

Tabel 3. 8
Target dan Realisasi Kinerja Pengawasan Desa

No	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	11 Laporan	9 Laporan	81,81%

Realisasi pencapaian kinerja output pada sub kegiatan ini adalah 9 laporan atau (81,81%) dari target 11 laporan. Rincian capaian kinerja output pada sub kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Monitoring dan Evaluasi Dana Desa :
 - Monitoring dan Evaluasi Dana Desa pada Desa Lamawalang Kecamatan Larantuka
Output/Kinerja : LHMONEV atas Dana Desa di Desa Lamawalang Kecamatan Larantuka Tahun Anggaran 2023.
 - Monitoring dan Evaluasi Dana Desa di Desa Pantai Oa

Kecamatan Wulanggitang

Output/Kinerja : LHMONEV atas Dana Desa di Desa Pantai Oa Kecamatan Wulanggitang TA. 2023

- Monitoring dan Evaluasi Dana Desa di Desa Lewopao Kecamatan Ile Boleng

Output/Kinerja : LHMONEV atas Dana Desa di Desa Lewopao Kecamatan Ile Ile Boleng TA. 2023

- Monitoring dan Evaluasi Dana Desa di Desa Tobitika Kecamatan Witihama

Output/Kinerja : LHMONEV Pengelolaan Dana Desa di Desa Tobitika Kecamatan Witihama

- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat

Output/Kinerja : LHMONEV Pengelolaan Dana Desa di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat

2) Pemeriksaan Reguler Desa :

- Pemeriksaan Reguler pada Desa Latonliwo Kecamatan Tanjung Bunga

Output/Kinerja : LHP Reguler Desa Latonliwo Kecamatan Tanjung Bunga

- Pemeriksaan Reguler Desa pada Desa Tuakepa Kecamatan Titehena

Output/Kinerja : LHP Reguler Desa Tuakepa Kecamatan Titehena

3) Pemeriksaan Kinerja Dana Desa terdiri dari :

- Audit Kinerja Dana Desa di Desa Bukit Seburi II Kecamatan Adonara Barat

Output/Kinerja : LHA Kinerja Dana Desa pada Desa Bukit Seburi II Kecamatan Adonara Barat

- Audit Kinerja Dana Desa di Desa Narasaosina Kecamatan Adonara Timur :

Output/Kinerja : LHA Kinerja Dana Desa pada Desa Narasaosina Kecamatan Adonara Timur

f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Tabel 3.9

Target dan Realisasi Kinerja Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

No	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	7 Laporan	7 Laporan	100%

Realisasi pencapaian kinerja output pada sub kegiatan ini adalah 7 laporan atau (100%) dari target 7 laporan. Rincian capaian kinerja output pada sub kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Monitoring Tindak Lanjut
 - Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur pada Desa Patisirawalang Kecamatan Tanjung Bunga
Output/kinerja : LHM terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur pada Desa Patisirawalang Kecamatan Tanjung Bunga.
 - Koordinasi Terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur pada Desa-Desa di wilayah Kecamatan Tanjung Bunga dan Kecamatan Lewolema
Output/Kinerja : LHM terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur pada Desa-Desa di wilayah Kecamatan Tanjung Bunga dan Kecamatan Lewolema.
 - Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur di Desa Lamawohong Kecamatan Solor Barat
Output/Kinerja : LHM terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur di Desa Lamawohong Kecamatan Solor Barat
 - Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur di Kantor Camat Tanjung Bunga

Output/Kinerja : LHM terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur di Kantor Camat Tanjung Bunga

- Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur pada Kantor Camat Wulanggitang dan Desa Hokeng Jaya

Output/Kinerja : LHM terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur pada Kantor Camat Wulanggitang dan Desa Hokeng Jaya.

- 2) Pemutakhiran Data di Provinsi NTT

Output/Kinerja : Perjalanan Dinas ke Provinsi

2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Sasaran : Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Indikator Kinerja : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

Pencapaian kinerja sasaran kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan dengan target dan realisasi sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Tabel 3.10

Target dan Realisasi Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

No	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan	1 Laporan	33,33%

Realisasi pencapaian kinerja output pada sub kegiatan ini adalah 1 laporan atau (33,33%) dari target 3 laporan.

Penanganan penyelesaian kerugian negara daerah yang rencana awalnya dilaksanakan Sidang Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TPTGR) atas dua temuan pemeriksaan BPK Perwakilan NTT namun tidak dilaksanakan sehingga pada momentum perubahan APBD 2023 anggaran yang tersedia dialihkan pada

kegiatan maupun sub kegiatan lainnya, termasuk untuk perjalanan dinas dalam rangka melakukan konsultasi tim ahli terkait perhitungan kerugian Negara/Daerah atas pembangunan Stadion Breung Center.

b. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

No	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	8 Laporan	8 Laporan	100%

Realisasi pencapaian kinerja output pada sub kegiatan ini adalah 8 laporan atau (100%) dari target 8 laporan. Rincian capaian kinerja output pada sub kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Probity Audit
Output/kinerja : Laporan Probity Audit pada Unit Layanan Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur TA. 2023
- 2) Audit Investigasi pada Tahun 2023 dilaksanakan pada 3 Obyek Pemeriksaan yaitu :
 - Desa Nelelamawangi Kecamatan Ile Boleng
Output/kinerja : Laporan Hasil Audit Investigasi TA. 2023 di Desa Nelelamawangi Kecamatan Ile Boleng.
 - Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado
Output/kinerja : Laporan Hasil Audit Investigasi TA. 2022 di Desa Wailebe Kecamatan Wotan Ulumado.
 - Audit Investigasi Dinas Perkebunan dan Peternakan
Output/Kinerja : Laporan Hasil Audit Investigasi Terkait Dugaan Penyalahgunaan Dana Program Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Kegiatan Padat Karya Tunai pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur.
- 3) PEMTAK Tutup Buku TA. 2023
 - Laporan Hasil PEMTAK Tutup Buku TA. 2023 Irban I
 - Laporan Hasil PEMTAK Tutup Buku TA. 2023 Irban II
 - Laporan Hasil PEMTAK Tutup Buku TA. 2023 Irban III
 - Laporan Hasil PEMTAK Tutup Buku TA. 2023 Irban IV
 - Laporan Hasil PEMTAK Tutup Buku TA. 2023 Irban V

- 4) Mendampingi Uji Fisik atas Pemeriksaan BPK
- 5) Kegiatan Gelar Pengawasan di 8 Kecamatan sebagai berikut:
Kecamatan Ile Boleng, Kecamatan Demon Pagong, Kecamatan Lewolema, Kecamatan Adonara Barat, Kecamatan Solor Barat, Kecamatan Adonara, Kecamatan Wulanggintang dan Kecamatan Ile Mandiri
- 6) Pengawasan Pelaksanaan Vaksin Covid -19
- 7) Monitoring Stock Opname Covid-19 per 31 Desember 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur

B. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan

Sasaran : Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.

Indikator Kinerja : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.

Pencapaian kinerja sasaran kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan dengan target dan realisasi sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Tabel 3.12

Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

No	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	2 Rekomendasi	3 Rekomendasi	150%

Realisasi Pencapaian Kinerja Output pada Sub Kegiatan Ini adalah 3 Rekomendasi/Dokumen atau (150%) dari 2 Target Rekomendasi/Dokumen.

Rincian capaian kinerja output pada sub kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Rencana Umum Program Kerja Pengawasan Tahunan (RUPKPT)
- 2) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
- 3) Peta Pengawasan

2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Sasaran : Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi

Indikator Kinerja : Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi.

Pencapaian kinerja sasaran kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan dengan target dan realisasi sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.13

Target dan Realisasi Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

No	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	8 OPD	11 OPD	137,50 %

Realisasi pencapaian kinerja output pada sub kegiatan ini adalah 11 OPD atau (137,50%) dari target 8 OPD. Rincian capaian kinerja output pada sub kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Pendampingan Penyusunan dan Penilaian Maturitas SPIP dilaksanakan pada :
 - Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur
 - Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur
 - Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur
 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur
 - Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Flores Timur
 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten

- Flores Timur
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur
 - Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Flores Timur
 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur
 - Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur
- 2) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP. Adapun hasil evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT belum ada sampai saat ini.
 - 3) Sinergitas APIP dan APH
Output/kinerja : Laporan Penyelenggaraan Hasil Kegiatan Sinergitas APIP dan APH
 - 4) Monitoring dan Pendampingan oleh Polres
Output/kinerja : Laporan Hasil Monitoring dan Pendampingan oleh Polres Flores Timur di 18 Desa dan 3 OPD

b. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi,
Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

No	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	8 OPD	8 OPD	100%

Realisasi pencapaian kinerja output pada sub kegiatan ini adalah 8 OPD atau 100% dari target 8 OPD. Rincian capaian kinerja output pada sub kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Reviu Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi :
Output/kinerja : *Tidak ada LHR* (kegiatan ini tidak dilaksanakan karena tidak ada Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Tingkat Kabupaten Flores Timur Tahun 2023).
- 2) Kegiatan *Monitoring Central Prevention* (MCP) pada :
 - Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
 - Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah

- Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur
- Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Badan Keuangan dan Aset Daerah
- Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Flores Timur
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Flores Timur.

c. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Tabel 3.15

Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

No	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Kegiatan	5 Kegiatan	62,50%

Realisasi Pencapaian Kinerja Output pada Sub Kegiatan Ini adalah 5 Kegiatan atau (62,50%) dari Target 8 Kegiatan. Rincian capaian kinerja output pada sub kegiatan ini sebagai berikut :

Sosialisasi dan Pencegahan SABER PUNGLI

- 1) Pengawasan dan Monitoring Satgas Saber Pungli di Pelabuhan Pelni
- 2) Pengawasan dan Monitoring Satgas Saber Pungli di Pelabuhan Feri Larantuka
- 3) Pengawasan dan Monitoring Satgas Saber Pungli Porter Pelabuhan yang melakukan pungli di Pelabuhan Deri Kecamatan Ile Boleng
- 4) Pengawasan dan Monitoring Satgas Saber Pungli di Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur
- 5) Pengawasan dan Monitoring Satgas Saber Pungli di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur.

d. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Tabel 3.16

Target dan Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Pendampingan,
Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

No	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	7 OPD	11 OPD	157,14 %

Realisasi pencapaian kinerja output pada sub kegiatan ini adalah 11 OPD atau 157,14% dari target 7 OPD. Rincian capaian kinerja output pada sub kegiatan ini sebagai berikut :

- 1) Survey Penilaian Integritas KPK :
 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur
- 2) Pendampingan Penginputan dan Pemutakhiran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).

Penginputan LHKPN dilaksanakan di 30 OPD sedangkan Penginputan dan Pemutakhiran LHPN dilaksanakan di 7 OPD sebagai berikut :

 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur
 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur
 - Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Flores Timur
 - Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur
 - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP2KBP3A) Kabupaten Flores Timur.
 - Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur
 - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur

3.2 Realisasi Anggaran

Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur memperoleh alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp5.484.332.897,00 (*lima milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh*) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai. Hingga akhir tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur telah terealisasi sebesar Rp5.214.063.721,00 (*lima milyar dua ratus empat belas juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu*) atau 95,07%. Rincian rencana dan realisasi anggaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2023
Berdasarkan Kelompok Belanja

Uraian Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase
Belanja Pegawai	3.916.508.976,00	3.748.398.236,00	95,71%
Belanja Barang dan Jasa	1.552.128.921,00	1.465.665.485,00	94,43%
Belanja Modal	15.695.000,00	-	0,00%
Total	5.484.332.897,00	5.214.063.721,00	95,07%

3.2.1 Belanja Program/Kegiatan

Alokasi anggaran belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.484.332.897,00 untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun sebesar Rp5.214.063.721,00 atau 95,07%. Rincian target dan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.18
Realisasi Belanja Program/Kegiatan
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur
Tahun 2023

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan Kegiatan	Anggaran			Persentase
			Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.809.610,00	27.288.600,00	3.521.010,00	88,57%
		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA	11.999.800,00	11.919.200,00	80.600,00	99,33%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.992.000,00	11.992.000,00	-	100,00%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.997.875,00	20.342.000,00	1.655.875,00	92,47%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.999.670,00	4.923.500,00	76.170,00	98,48%
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.480.000,00	7.458.000,00	22.000,00	99,71%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	3.869.008.976,00	3.703.398.236,00	165.610.740,00	95,72%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan administrasi Kepegawaian	9.999.740,00	9.555.200,00	444.540,00	95,55%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	136.220.000,00	130.302.791,00	5.917.209,00	95,66%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	1.999.386,00	1.998.500,00	886,00	99,96%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.998.250,00	19.906.500,00	91.750,00	99,54%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.999.800,00	24.750.700,00	249.100,00	99,00%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.999.600,00	1.998.000,00	1.600,00	99,92%
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	6.173.000,00	8.827.000,00	41,15%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.675.000,00	92.554.619,00	120.381,00	99,87%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.497.500,00	2.500,00	99,83%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.990.000,00	31.707.320,00	3.282.680,00	90,62%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.000.000,00	78.400.000,00	1.600.000,00	98,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.	23.886.700,00	22.924.105,00	962.595,00	95,97%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.989.100,00	19.725.000,00	264.100,00	98,68%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.950.000,00	2.660.000,00	290.000,00	90,17%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.199.660,00	-	19.199.660,00	0,00%

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	74.780.000,00	51.605.000,00	23.175.000,00	69,01%
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	66.093.830,00	60.058.000,00	6.035.830,00	90,87%
		Reviu Laporan Kinerja	19.650.000,00	19.535.000,00	115.000,00	99,41%
		Reviu Laporan Keuangan	19.998.600,00	15.594.000,00	4.404.600,00	77,98%
		Pengawasan Desa	84.998.750,00	81.821.000,00	3.177.750,00	96,26%
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil 'Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	39.966.000,00	34.041.200,00	5.924.800,00	85,18%
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	22.079.830,00	20.787.900,00	1.291.930,00	94,15%
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	400.324.120,00	397.640.850,00	2.683.270,00	99,33%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	21.930.500,00	21.405.500,00	525.000,00	97,61%
	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	140.314.250,00	135.793.000,00	4.521.250,00	96,78%
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	14.811.850,00	8.697.500,00	6.114.350,00	58,72%
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	75.850.000,00	75.850.000,00	-	100,00%
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	14.840.000,00	14.760.000,00	80.000,00	99,46%
		T O T A L	5.484.332.897,00	5.214.063.721,00	270.269.176,00	95,07%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2023 ini merupakan suatu pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Tugas, Fungsi dan Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Penyusunan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 memiliki 1 (satu) sasaran strategis, yakni Penurunan penyimpangan pengelolaan keuangan dengan indikator kinerja utama jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti. Pencapaian kinerja sasaran strategis adalah sebesar 55,68% atau 136,40% dari target sebesar 40,82%. Sedangkan pencapaian kinerja secara keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan hanya mencapai 94,62%. Dengan pencapaian ini maka kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 berada pada kriteria penilaian **“Sangat Tinggi”** atau **94,62%**. Adapun rincian hasil pencapaian kinerja atas indikator capaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (dua) sasaran yang memiliki kinerja sangat tinggi;
2. Terdapat 2 (dua) sasaran yang memiliki kinerja tinggi;
3. Terdapat 0 (nol) sasaran yang memiliki kinerja sedang;
4. Terdapat 0 (nol) sasaran yang memiliki kinerja rendah; dan
5. Terdapat 0 (nol) sasaran yang memiliki kinerja sangat rendah.

Pencapaian realisasi anggaran untuk mendukung program/kegiatan yang didapatkan sebesar 95.07% dengan hasil:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini terdiri dari 9 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan. Capaian kinerja yang dicapai sebesar 95,27%

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Pada Program ini dari 2 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan. Capaian kinerja yang dicapai sebesar 93,57%

3. Program Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Pada Program ini dari 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan, capaian kinerja yang dicapai sebesar 95,80%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada semua pihak yang membutuhkan informasi kemajuan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya LKIP ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi instansi untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai program-program kegiatan yang sudah direncanakan sesuai visi, misi dan strategi/kebijakan instansi.

Demikian laporan kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Larantuka, Januari 2024

Inspektur Daerah
Kabupaten Flores Timur,



Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP

Pemula Muda

NIP. 19651023 199503 1 002

LAMPIRAN



REVISI PERJANJIAN KINERJA



**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2023**

**LARANTUKA
2023**



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si
Jabatan : Penjabat Bupati Flores Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si

Larantuka, Oktober 2023
Pihak Pertama,


Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19651023 199503 1 002

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

I Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti		40,82%

No	Program	Anggaran (Rp)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.466.045.151	4.488.695.167	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	455.470.980	727.891.130	APBD
3	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	94.765.350	267.746.600	APBD
TOTAL		5.016.281.481	5.484.332.897	APBD

II Kinerja Pendukung

1. Proses Pengadaan Barang dan Jasa telah terkontrak per 30 Juli 2023
2. TLHP temuan di bawah Tahun 2020 Administrasinya 85-100%
3. TLHP Tahun 2020 keatas harus 80-100%
4. Penyampaian LPPD, LKPJ dan LKIP paling lambat 15 Maret Tahun 2023
5. LHKPN tahun berkenan minimal 100% batas waktu 31 Maret Tahun 2023
6. TPTGR sampai dengan tahun berkenan minimal 50%


 Penjabat Bupati Flores Timur,
 Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si

Larantuka, Oktober 2023
 Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur,

 Antonius Lebi Raya, S.Sos, M.AP
 Pembina Utama Muda
 NIP.196510231995031002



SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP

NIP : 19651023 199503 1 002

Pangkat : Pembina Utama Muda

Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur

Dengan ini menyatakan bahwa saya siap mengundurkan diri dari jabatan yang saya duduki saat ini terhitung tanggal karena tidak mencapai target sesuai perjanjian kinerja yang telah saya perjanjikan dan hal-hal lain menurut pertimbangan Penjabat Bupati Flores Timur.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai wujud komitmen Perjanjian Kinerja.

Mengetahui
Penjabat Bupati Flores Timur,

Drs. Dafis Alexander Rihi, M.Si

Larantuka, Oktober 2023
Yang membuat Pernyataan,

Antonius Lebi Raya, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19651023 199503 1 002



REVISI PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fransiskus Xaverius Resiona, S.Sos
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Antonius Lebi Raya, S.Sos, M.AP
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

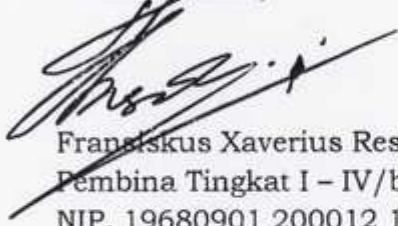
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Larantuka, Oktober 2023

Pihak Kedua,


Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19651023 199503 1 002

Pihak Pertama,


Fransiskus Xaverius Resiona, S.Sos
Pembina Tingkat I - IV/b
NIP. 19680901 200012 1 005

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

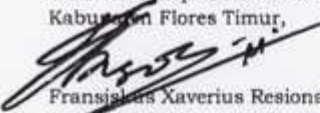
No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Tersedia	14 Dokumen/ Laporan	14 Dokumen/ Laporan
2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44 Orang/ Bulan 12 Dokumen	44 Orang/ Bulan 12 Dokumen
3	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang OPD	3 Laporan	3 Laporan
4	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Unsur Kapabilitas APIP	2 Dokumen	2 Dokumen 4 Orang
5	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Barang, Dokumen dan Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang disediakan	7 Paket 42 Laporan / Dokumen	9 Paket 42 Laporan / Dokumen
6	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Yang Disediakan	3 Unit	2 Unit
7	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35 Laporan	36 Laporan
8	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	26 Unit	26 Unit
9	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawas:	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawaan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Rp		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.466.045.151	4.488.695.167	APBD
1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.997.645	76.799.285	APBD
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.010.490.880	3.914.008.976	APBD
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.995.170	12.479.670	APBD
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.999.740	146.219.740	APBD
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.246.296	156.672.036	APBD
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.999.620	19.199.660	APBD
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.490.000	116.490.000	APBD
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.825.800	46.825.800	APBD
B	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	19.964.500	21.930.500	APBD
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	19.964.500	21.930.500	APBD
TOTAL		4.486.009.651	4.510.625.667	APBD

Menyetujui
Pihak Kedua
Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur,

Antonius Jebi Raya, Sos., M.AP
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP.19651023 199503 1 002

Larantuka, Oktober 2023

Pihak Pertama
Sekretaris Inspektorat Daerah
Kabupaten Flores Timur,

Fransiskus Xavierius Resiona, S.Sos
Pembina Tingkat I - IV/b
NIP. 19680901 200012 1 005



REVISI PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laurensius S Fernandez Aikoli, SP
Jabatan : Inspektur Pembantu I
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Antonius Lebi Raya, S.Sos, M.AP
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

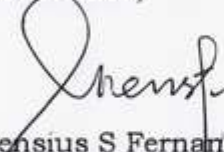
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Larantuka, Oktober 2023

Pihak Kedua,


Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19651023 199503 1 002

Pihak Pertama,


Laurensius S Fernandez Aikoli, SP
Pembina Tk. I - IV/b
NIP. 19680618 199803 1 011

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR PEMBANTU I
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	54 Laporan/ Dokumen	54 Laporan/ Dokumen
2	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	9 Laporan	11 Laporan
3	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi
4	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah Yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	2 Kegiatan 23 Perangkat Daerah	8 Kegiatan 23 Perangkat Daerah

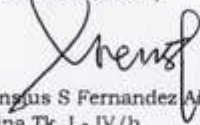
No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Rp		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
A	Program Penyelenggaraan Pengawasan	455.470.980	727.891.130	APBD
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	254.646.790	305.487.180	APBD
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	200.824.190	422.403.950	APBD
B	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	94.766.350	267.746.600	APBD
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	19.964.500	21.930.500	APBD
2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	74.801.850	245.816.100	APBD
TOTAL		550.237.330	995.637.730	APBD

Menyetujui
Pihak Kedua
Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur,


Antonius Lebi Raya, Sos., M.AP
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP.19651023 199503 1 002

Larantuka, Oktober 2023

Pihak Pertama
Inspektur Pembantu I,


Laurengius S Fernandez Alkoli, SP
Pembina Tk. I - IV/b
NIP.19680618 199803 1 011



REVISI PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Apollonaris Bala Agan, S.Pi
Jabatan : Inspektur Pembantu II
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Antonius Lebi Raya, S.Sos, M.AP
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

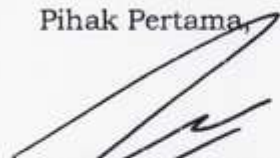
Larantuka, Oktober 2023

Pihak Kedua



Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19651023 199503 1 002

Pihak Pertama


Apollonaris Bala Agan, S.Pi
Pembina Tk. I - IV/b
NIP. 19690822199803 1 010

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR PEMBANTU II
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	54 Laporan/ Dokumen	54 Laporan/ Dokumen
2	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	9 Laporan	11 Laporan
3	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi
4	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah Yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	2 Kegiatan 23 Perangkat Daerah	8 Kegiatan 23 Perangkat Daerah

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Rp		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
A	Program Penyelenggaraan Pengawasan	455.470.980	727.891.130	APBD
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	254.646.790	305.487.180	APBD
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	200.824.190	422.403.950	APBD
B	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	94.766.350	267.746.600	APBD
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	19.964.500	21.930.500	APBD
2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	74.801.850	245.816.100	APBD
TOTAL		550.237.330	995.637.730	APBD

Mengetahui
Pihak Kedua
Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur,

Antonius Lebi Raya, Sps., M.AP
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP.19651023 199803 1 002

Larantuka, Oktober 2023

Pihak Pertama
Inspektur Pembantu II,


Antonius Bala Agan, S.Pi
Pembina Tk. I - IV/b
NIP.19690822 199803 1 010



REVISI PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kornelia Serang Koten, S.Sos
Jabatan : Inspektur Pembantu III
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Antonius Lebi Raya, S.Sos, M.AP
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

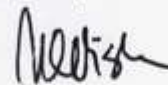
Larantuka, Oktober 2023

Pihak Kedua,



Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19651023 199503 1 002

Pihak Pertama,



Kornelia Serang Koten, S.Sos
Pembina Tk. I - IV/b
NIP. 19691014 199903 2 005

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR PEMBANTU III
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	54 Laporan/ Dokumen	54 Laporan/ Dokumen
2	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	9 Laporan	11 Laporan
3	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi
4	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah Yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	2 Kegiatan 23 Perangkat Daerah	8 Kegiatan 23 Perangkat Daerah

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Rp		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
A	Program Penyelenggaraan Pengawasan	455.470.980	727.891.130	APBD
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	254.646.790	305.487.180	APBD
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	200.824.190	422.403.950	APBD
B	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	94.766.350	267.746.600	APBD
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	19.964.500	21.930.500	APBD
2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	74.801.850	245.816.100	APBD
TOTAL		550.237.330	995.637.730	APBD



Larantuka, Oktober 2023

Pihak Pertama
Inspektur Pembantu III,

Kornelia Serang Koten, S.Sos
Pembina Tk. I - IV/b
NIP.19691014 199903 2 005



REVISI PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suhaemi, SE
Jabatan : Inspektur Pembantu IV
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Antonius Lebi Raya, S.Sos, M.AP
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Larantuka, Oktober 2023



Pihak Kedua,

Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19651023 199503 1 002

Pihak Pertama,

Suhaemi, SE
Pembina Tk I - IV/b
NIP. 19680821 199703 1 007

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR PEMBANTU IV
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	54 Laporan/Dokumen	54 Laporan/Dokumen
2	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	9 Laporan	11 Laporan
3	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi
4	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah Yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	2 Kegiatan 23 Perangkat Daerah	8 Kegiatan 23 Perangkat Daerah

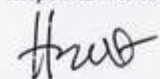
No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Rp		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
A	Program Penyelenggaraan Pengawasan	455.470.980	727.891.130	APBD
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	254.646.790	305.487.180	APBD
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	200.824.190	422.403.950	APBD
B	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	94.766.350	267.746.600	APBD
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	19.964.500	21.930.500	APBD
2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	74.801.850	245.816.100	APBD
TOTAL		550.237.330	995.637.730	APBD

Menyetujui
Pihak Kedua
Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur,

INSPEKTORAT DAERAH
Antonius Lebi Raya, Sos., M.AP
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP.196510231995031002

Larantuka, Oktober 2023

Pihak Pertama
Inspektur Pembantu IV,


Suhaemi, SE
Pembina Tk. I - IV/b
NIP.196808211997031007



REVISI PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Simon Senari Beda, SST
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan
Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fransiskus Xaverius Resiona, S.Sos
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Larantuka, Oktober 2023

Pihak Kedua,

Fransiskus Xaverius Resiona, S.Sos
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 19680901 200012 1 005

Pihak Pertama,

Simon Senari Beda, SST
Penata Tingkat I – III/d
NIP. 19720305 199203 1 006

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen
3	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan
4	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan
5	Terselenggaranya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Rp		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
A	Program, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	64.997.645	76.799.285	APBD
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.997.645	76.799.285	APBD
a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.999.240	30.809.610	APBD
b	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	14.999.880	11.999.800	APBD
c	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.999.300	11.992.000	APBD
d	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.999.225	21.997.875	APBD
B	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	19.964.500	21.930.500	APBD
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	19.964.500	21.930.500	APBD
a	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	19.964.500	21.930.500	APBD
TOTAL		84.962.145	98.729.785	APBD

Larantuka, Oktober 2023

Menyetujui
Pihak Kedua
Sekretaris Inspektorat Daerah
Kabupaten Flores Timur,

Fransiskus Xaverius Resiona, S.Sos
Pemuda Tingkat I - IV/b
NIP. 19680901 200012 1 005

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Perencanaan,

Simon Senari Beda, SST
Penata Tingkat I - III/d
NIP. 19720305 199203 1 006

